PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK MENYAJIKAN DATA PEMERINTAHAN YANG AKURAT

(Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya)

Ananda Intan Pratiwi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, intanpratiwi181120@gmail.com;

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 SSurabaya, radjikan@untag-sby.ac.id;

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, endah@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Dalam era globalisasi ini pengelolaan data kependudukan yang ada di Indonesia sudah harus mulai menggunakan teknologi di dalamnya. Dengan adanya penggunaan teknologi dalam Pengelolaan data penduduk ini maka akan lebih mempermudah lagi kerja dari pemerintah. Pengunaan teknologi dalam melakukan semua kegiatan di pemerintahan merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menerapkan E Government/ Electronic Government. Di pemerintah, Dispendukcapil memiliki tugas untuk membantu pemimpin daerah dalam pelaksanaan urusan kepemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil. Saat ini dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil kota Surabaya terdapat beberapa inovasi di dalamnya, salah satunya yaitu Klampid New Generation (KNG). Klampid New Generation ini merupakan aplikasi dan juga web yang digunakan untuk membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara online yang di dalamnya mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah dan juga datang. Di Surabaya sendiri dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi selain dapat di lakukan pribadi tetapi juga bisa di lakukan di kelurahan maupun kecamatan yang ada di Surabaya, Adanya Inovasi ini, bisa meningkatkan kinerja Dispenduk dalam memberikan pelayanan kepada warga. Selain menggunakan aplikasi KNG, dalam proses pengelolaan Administrasi kependudukan juga menggunakan aplikasi SIAK. meskipun sudah menggunakan teknologi, tetapi dalam masyarakat masih terdapat beberapa masalah dalam proses

pengelolaan data kependudukan yang perlu untuk dibahas lagi supaya terdapat solusi untuk mengatasi masalah itu.

Kata kunci: Pengelolaan data kependudukan, KNG, SIAK, Administrasi Kependudukan

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini pengelolaan data kependudukan yang ada di Indonesia sudah harus mulai menggunakan teknologi di dalamnya. Hal ini sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No.95 Tahun 2018, 2018). Dengan adanya penggunaan teknologi dalam Pengelolaan data penduduk ini maka akan lebih mempermudah lagi kerja dari pemerintah yang bertugas di dalam bidang ini. pengunaan teknologi dalam melakukan semua kegiatan di pemerintahan merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menerapkan E Government/ Electronic Government, terkecuali juga Dispendukcapil kota Surabaya. Di pemerintah, Dispendukcapil memiliki tugas untuk membantu pemimpin daerah dalam pelaksanaan urusan kepemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil (Admin, n.d.). Di setiap daerah baik kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia memiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing tidak terkecuali Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota Di Jawa Timur. Untuk tugas dari Dispendukcapil kota Surabaya sendiri sudah di atur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Di dalamnya di jelaskna bahwa Dispendukcapil sendiri disini memiliki beberapa tugas di dalamnya sesuai denga Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi, Ayat (1) Dinas Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu. Ayat (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Wonorejo et al., 2021). Dari peraturan diatas bisa dilihat bahwa tugas dari Dispendukcapil kota Surabaya sendiri disini adalah untuk membantu wali kota dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dimulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan juga evaluasi.

Saat ini dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil kota Surabaya terdapat beberapa inovasi di dalamnya, diantaranya yaitu Takon Klampid (merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui status dari dokumen yang sedang diajukan oleh pemohon sekaligus informasi tentang kepengurusan kependudukan), Jempol Sekti (Jemput Pelayanan Online By Sistem Elektronik Kependudukan Terintegrasi), Punta Dewa

(Himpunan Data Demografi Kawasan), Coex (Call Center bagi masyarakat umum dan juga kelurahan dan kecamatan dalam melaksanakan pelayanan adminduk), Paket Hemat (inovasi pelayanan adminduk yang dapat menerbitkan dokumenkependudukan secara bersamaan), Layanan Duo Lontong (layanan pelayanan online pengadilan agama dan pengadilan negeri) dan ACO ERI (Application Center and Online of E-Court Registration and Integration), Kate – Pay (Inovasi yang menciptakan KIA agar dapat menjadi alat pembayaran khususnya bagi siswa sekolah) dan juga Klampid New Generation. Dalam pembaruan data kependudukan inovasi yang paling sering digunakan adalah Klampid New Generation. Klampid New Generation ini merupakan aplikasi dan juga web yang digunakan untuk membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara online yang di dalamnya mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah dan juga datang (dispendukcapil kota surabaya, n.d.). Di Surabaya sendiri dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi selain dapat di lakukan pribadi tetapi juga bisa di lakukan di kelurahan maupun kecamatan yang ada di Surabaya, Hal ini sesuai dengan arahan dari wali kota Surabaya. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Surabaya (Harto, Ambosius; Pandia, 2021).

Berlakunya inovasi dalam kepengurusan data kependudukan ini, selain mengikuti perubahan era yang serba digital, juga untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan dan untuk mengurangi praktek mal administrasi yang sering terjadi di pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi ini pemerintah berharap warga bisa lebih nyaman dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan. khusunya untuk data kependudukan ini. karena data ini sangatlah penting bagi pembangunan di kota Surabaya.

Untuk pengelolaan data kependudukan di Dispendukcapil kota Surabaya sendiri, untuk pendaftaran data kependudukan saat ini bisa menggunakan aplikasi atau website KNG (Klampid New Generation). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Dispendukcapil berfokus pada memberikan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

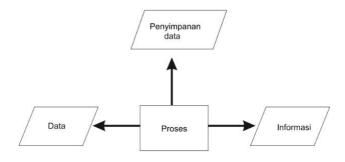
Dari instansi pemerintah ini dalam melakukan tugasnya sudah menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya. Selain itu peraturan-peraturan yang ada di kota Surabaya kebanyakan dibuat untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengurus masalah kependudukan, baik itu mengurus administrasi kependudukan, maupun ingin mencari informasi perihal kependudukan di Kota Surabaya. Karena pelayanan saat ini di Surabaya lebih di dekatkan lagi ke masyarakat, maka penulis melakukan beberapa observasi dan wawancara kepada RT/RW dan juga terhadap warga khususnya pada satu daerah yang ada di Kota Surabaya untuk mengetahui bagaimana manajemen pengolahan data kependudukan. Dan di ketahui bahwa masih ada beberapa hal yang harus lebih di cari tau permasalahannya. Hal itu diantaranya ialah terdapat beberapa data warga yang seharusnya sudah hilang karena berbagai alasan seperti pindah dan juga meninggal, Tapi sering sekali di temukan data penduduk tersebut masih ada. Lalu ada juga data penduduk yang terblokir tiba-tiba tanpa diketahui alasannya oleh warga. Selain itu rt dan juga rw sering sekali mempertanyakan apakah

selama ini data dari warga tidak mengalami perubahan, Padahal warga di daerah tersebut bisa dikatakan sudah lumayan tertib dalam administrasi kependudukan. Tapi kenapa hal-hal seperti diatas masih sering terjadi. Padahal pada era digital ini harusnya semakin mudah dalam mengupdate data kependudukan dari warga. Karena beberapa hal ini pula penulis memiliki ketertarikan terhadap masalah ini. penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dari permasalahan yang di utarakan oleh RT/RW dan juga warga ini. Sehingga disini nantinya bisa menciptakan data pemerintah yaitu data kependudukan yang lebih akurat lagi.

Dari penjelasan di atas apabila di Tarik kesimpulan maka terdapat dua masalah yangingin di teliti, yaitu bagaimana pengelolaan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dilaksanakan? Dan yang kedua, apa saja faktor penghambat dan juga faktor pendukung dalam kegiatan pengelolaan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori pengelolaan data merupakan teori utama yang indikatornya digunakan dalam penelitian kali ini. dijelaskan bahwa data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian merupakan suatu yang terjadi pada saat tertentu di dalam sebuah duni bisnis. Sedangkan kesatuan nyata ialah berupa suatu objek yang nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik garis kesimpulan bahwa data merupakan bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Hal ini bisa di lihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar Pemrosesan Data Sumber: (Sutabri, 2012)

Menurut John J. Longkutoy dalam (Sutabri, 2012) istilah data merupakan sebuah istilah majemuk yang memiliki arti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti dihubungkan dengan kenyataan, symbol-simbol, gambargambar, angka-angka, huruf-huruf, atau symbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi dan lainnya. Lebih jelasnya data disini bisa berupa apa saja dan dapat ditemui dimana saja. kegunaan dari data sendiri adalah sebagai bahan dasar yang objektif di dalam proses kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan organisasi. Bagi kehidupan manusis data merupakan suatu hal yang sangat

penting karena data merupakan proses hasil pengamatan atau observasi yang kemudian menjadi pengetahuan (Sutabri, 2012).

Data dapat diklasifikan menjadi beberapa hal menurut pada jenis, sifat dan sumber. Klasifikasi menurut jenis data terbagi menjadi data hitung dan data ukur. Menurut Sifat data dibagi menjadi data kuantitatif fan data kualitatif. Sedangkan menurut Sumber Data nya dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Sebuah data juga bisa menjadi bernilai. tetapi harus memenuhi 3 ketentuan. Ketentuan ini disebutkan oleh Dr. Marseto dalam (Sutabri, 2012) diantaranya yaitu:

- 1. Ketelitian data (precision)
 - Ketelitian sebuah data ditentukan oleh kecilnya perbedaan, apabila observasi yang menghasilkan data itu diulangi.
- 2. Komparabilitas data (*comparability*)

Suatu pertimbangan yang berulang-ulang menunjukkan hasil yang sama belum tentu memberikan data yang benar. Karena suatu pengukuran pada hakikatnya dilakukan dengan cara membandingkan sesuatu terhadap suatu standar.

3. Validitas dara (*validity*)

Suatu data dapat mempunyai kualitas yang baik, tetapi hal ini belum tentu valid atau berguna jika tidak menunjang tercapainya tujuan si pemakai (*user*).

Data merupakan suatu bahan mentah untuk diolah, dimana hasilnya nanti akan menjadi sebuah informasi. Dengan ini maka data yang sudah diperoleh harus diukur dan dinilai baik dan burunya, berguna atau tidak dalam hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Pengelolaan data sendiri menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Konsep system informasi terdiri dari beberapa kegiatan penyimpanan data dan penanganan data.

1. Penyimpanan data (data storage)

Kegiatan penyimpanan data meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan (filing), pencarian (searcing), dan pemeliharaan (maintenance). Data disimpan pada suatu tempat yang dinamakan file. Sebelum disimpan, data sebelumnya diberi sebuah kode sesuai dengan jenis kepentingannya. Dalam hal ini pengkodean memegang sebuah peranan yang penting. Karena apabila kode yang salah akan mengakibatkan data yang masuk kedalam file juga salah. Dan ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mencari data tersebut apabila nanti diperlukan. Metode yang baik dalam melaksanakan hal ini adalah dengan menggunakan metode referensi silang (*cross reference*) antara file satu dengan fiel yang lainnya.

Untuk pelaksanaan pencarian data (*searching*) di dalam file, maka file bisa di bagi menjadi 2 jenis yaitu: (1) file induk (*master file*), (2) File Transaksi (*detail file*). Pemerliharaan file (*file maintenance*) di dalamnya terdapat beberapa bagian di dalamnya yaitu: peremajaan data (*data updating*), yaitu kegiatan menambah catatan baru pada suatu data, mengadakan perbaikan, dan lainnya.

2. Penanganan data (data handling)

Penanganan data merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa hal diantaranya yaitu: pemeriksaan (*verifying*), perbandingan (*comparing*), pemilihan (*soeting*), peringkasan (*extracting*), dan penggunaan

*manipulating). Proses pemerinkasaan data mencakup pada kegiatan pengecekan data yang muncul pada berbagai sumber, mengetahui berbagai sumber, dan mengetahui perbedaan maupun ketidaksesuaian, kegian pemeriksaan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan pemeliharaan file. Pemilihan dalam kegiatan penanganan data mencakup peraturan dalam suatu urutan yang teratur. Peringkasan merupakan sebuah kegiatan yang mencakup keterangan pilihan. Penggunaan data merupakan kegiatan untuk menghasilkan informasi. Tujuan dai kegiatan penggunaan data ini adalah untuk menyajikan informasi yang memadai mengenai apa yang terjadi pada waktu yang lama guna menunjang manajemen, terutama untuk membantu menyelidiki alternatif kegiatan yang akan datang.

Dari 2 Indikator yang terdiri dari beberapa sub indikator, nantinya akan digunakan 6 sub indikator sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini. dari indikator pertama diambil 3 sub indikator, dan untuk indikator ke 2 juga diambil 3 sub indikator. Indikator Penyimpanan data sub indikator yang digunakan yaitu Pengumpulan, Pencarian, dan Pemeliharaan. Sedangkan untuk indikator Penanganan Data, sub indikator yang digunakan diantaranya yaitu pemeriksaan, pemilihan, dan penggunaan. Dengan dilakukannya analisis menggunakan beberapa sub indikator ini, diharapkan nantinya bisa membuat pemerintah kota Surabaya lebih akurat lagi dalam menyajikan data kependudukan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan dianggap sangat cocok apabila digunakan untuk penelitian yang diangkat ini, sehingga nantinya focus dari penelitian ini akan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sesungguhnya. Dimana disini nanti penulis ingin mencari tahu bagaimana pengelolaan data kependudukan yang ada di Dispendukcapil Kota Surabaya. Penelitian ini cocok menggunakan Kualitatif karena penulis ingin mengambil data penelitian berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi dengan petugas yang bertugas mengelola data kependudukan yang ada di Dispendukcapil Kota Surabaya. Dari hasil wawancara dan observasi ini nanti akan di analisis menggunakan beberapa indikator dari teori Pengelolaan data.

Fokus dari penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu permasalahan manajemen data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Permasalahan diantaranya yaitu data penduduk yang tidak mengalami pembaharuan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Identifikasi dari permasalahan pengelolaan data kependudukan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini menggunakan beberapa indikator dari Teori Pengelolaan Data oleh Tata Sutabri.

Penelitian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini berada di satu tempat, yaitu di Dispendukcapil Kota Surabaya yang bertugas untuk mengurus Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kota Surabaya dengan lama waktu penelitian 1 bulan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dikarenakan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan akurat sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini.

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 1 (2023) e-ISSN: 2797-04692

Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara. Dalam kegiatan wawancara ini terdapat informan yang akan menjadi narasumber yaitu 3 petugas dari Dispendukcapil Kota Surabaya, dan 3 Penduduk Kota Surabaya. Lalu kegiatan lainnya yaitu observasi. Disini penulis melakukan observasi kepada salah satu petugas Dispendukcapil Kota Surabaya. Dan Dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Data Kependudukan Di Dispendukcapil Kota Surabaya

Pada proses pengelolaan data kependudukan menurut teori Tata Sutabri bisa berpatokan pada beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menganalisis proses pengelolaan data kependudukan, apakah sudah maksimal atau masih perlu adanya perbaikan. Indikator-indikator tersebut diantaranya yaitu:

Penyimpanan Data (Data Storage)

a) Pengumpulan Data (filling)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 3 narasumber dan juga dari keterangan dari 3 warga Surabaya diketahui bahwa proses pengumpulan data kependudukan sudah bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan dari Pihak Dispendukcapil Kota Surabaya sudah berusaha meningkatkan inovasi agar proses pengumpulan data kependudukan di Dispendukcapil bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan aplikasi pendukung Pengelolaan kependudukan yang dulu berawal dari six in one, lalu dikembangkan menjadi Klampid, dan baru-baru ini berkembang lagi menjadi KNG (Klampid New Generation). Selain itu Dispendukcapil juga berusaha lebih mendekatkan pelayanan kepengurusan adminduk ini kemasyarakat, dengan masyarakat bisa melakukan pengajuan secara mandiri menggunakan aplikasi KNG khusus warga, apabila warga tidak bisa mengajukan secara mandiri, bisa meminta bantuan petugas Kecamatan, Kelurahan, RT/RW Kalimasada untuk mendaftarkan pengajuan melalui aplikasi KNG.

Meskipun sudah banyak melakukan perkembangan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan. Seperti peningkatan kemampuan petugas kecamatan, kelurahan dan yang terpenting juga RT/RW kalimasada dalam menggunakan aplikasi KNG ini untuk membantu warga dalam melakukan permohonan. Selain itu, untuk RT/RW Kalimasada harus lebih gencar lagi dalam menggalakkan program kerja Kalimasada ini, seperti memanfaatkan tenaga para pemuda untuk membantu warga yang sudah lanjut usia dalam melakukan pengajuan melalui aplikasi KNG ini. jadi selain melakukan peningkatan inovasi, agar pengumpulan data penduduk ini berjalan dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga dengan pihakpihak lain nya. Selain meminta bantuan pihak lain, tetapi mereka juga harus diberika pembekalan agar mereka bisa dengan mudah menggunakan aplikasi KNG ini sebagai pendukung dalam prose penglolaan data kependudukan yaitu sebagai alat untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data penduduk.

b) Pencarian (searching)

Dari hasil analisis penulis mengenai proses pencarian dalam kegiatan pengelolaan data kependudukan yang ada di Dispendukcapil kota Surabaya sudah baik. Karena disini untuk mencari data penduduk sudah baik, dimulai dari data penduduk yang di SIAK sudah di bedakan menjadi beberapa jenis, dimulai dari data berdasarkan wilayah, data perseorangan, data kependudukan, dan juga data pencatatn sipil. Apabila ingin mencari data berdasarkan wilayah. Maka bisa memasukkan kode dari wilayah tersebut, karena setiap data wilayah memiliki kode masing-masing. Untuk data perseorangan, data kependudukan, dan juga pencatatan sipil maka bisa menggunakan no. NIK, ataupun No. KK.

Dengan adanya SIAK terpusat seperti ini, maka mengurangi banyak resiko dalam proses pengelolaan data kependudukan. Salah satunya adalah data ganda. Karena saat ada penduduk yang akan melakukan permohonan dan saat memasukkan data nya ke SIAK terdapat kendala dan saat di cari ternyata penduduk ini memiliki data ganda, maka salah satu data penduduk ini bisa langsung di hapus di aplikasi SIAK ini.

c) Pemeliharaan (maintenance)

Dalam proses pengelolaan data terdapat kegiatan pemeliharaan. Dalam kegiatan ini melakukan proses mengupdate data yang ada dalam system. Jika diamati dalam kerja Dispendukcapil dalam mengelola data kependudukan, untuk kegiatan updating data ini sendiri sudah baik dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat untuk update data kependudukannya sendiri ini dilakukan saat ada pengajuan permohonan. Jadi dalam system SIAK terpusat yang saat ini digunakan untuk data penduduk akan otomatis terupdate saat penduduk itu melakukan proses pengajuan dokumen administrasi kependudukan. Bedanya SIAK terpusat dan SIAK terdistribusi adalah untuk SIAK terpusat data penduduk terupdate tidak hanya dalam tingkat data base daerah, melainkan juga dalam data base nasional. Sehingga dengan ini lebih meminimalisir data ganda pada warga. Sedangkan untuk SIAK terdistribusi data kependudukan hanya terupdate pada data base daerah saja, untuk data base pusat akan dilakukan konsolidasi data kependudukan setiap semester sekali. Dengan hal ini, maka terdapat resiko data kependudukan ada yang ganda antara satu daerah satu dengan lainnya.

Selain update tentang data kependudukan, kegiatan updating juga dilakukan saat pengembangan system yang digunakan untuk proses pengelolaan data kependudukan. Dimulai dari aplikasi KNG yang merupakan aplikasi tambahan dalam pengelolaan data kependudukan selalu mengalami update pada sistemnya minimal 1 tahun sekali. Tapi sewaktu-waktu juga bisa dilakukan update pada system KNG apabila ditemukan sebuah masalah terhadap sistemnya. Seperti saat ini untuk aplikasi KNG khusus warga sedang dalam proses update system, karena ditemukan bahwa keamanan pada aplikasi KNG masih kurang kuat. Sedangkan untuk updating pada system SIAK yang merupakan system utama dalam pengelolaan data kependudukan ini sendiri, karena SIAK terpusat maka yang melakukan updating system nya adalah petugas dari pusat. Biasanya untuk update SIAK ini sendiri dilakukan dalam

satu tahun minimal 3-4 kali update. Tetapi bisa juga dilakukan update sewaktu-waktu jika diperlukan.

Penanganan Data (data handling)

a. Pemeriksaan (verifying)

Untuk proses pemeriksaan pada pengelolaan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya sudah baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pemeriksaaan ini dilakukan berulang kali dimulai pada saat penduduk melakukan permohonan melalui aplikasi KNG. Pada aplikasi ini penduduk akan dituntun oleh bot chat yang akan memandu mereka melakukan pendaftaran permohonan melalui aplikasi KNG. Apabila ada data yang tidak lengkap, maka permohonan ini tidak akan bisa di kirim sebelum data yang harus diisi di KNG semuanya terisi. Untuk proses pemeriksaan yang ke dua, apabila penduduk menggunakan bantuan petugas kecatamatan, kelurahan, maupun RT/RW maka mereka sebelum mengajukan ke dalam aplikasi KNG tentunya akan memeriksa terlebih dahulu apakah persyaratan yang dibawa penduduk saat akan mengajukan permohonan ini sudah lengkap apa belum. Kalua sudah akan dilanjutkan dengan memasukkan permohonan di aplikasi KNG, kalua belum maka penduduk itu akan di minta untuk melengkapi persyaratan tersebut terlebih dahulu.

Untuk pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan oleh operator SIAK dan KNG. Setelah selesai melakukan permohonan di aplikasi KNG, maka operator SIAK dan KNG ini akan memeriksa Kembali apakah data penduduk dan syarat-syarat nya sudah lengkap apa belum kalau sudah lengkap maka akan didaftarkan ke dalam SIAK ini. setelah itu akan diverifikasi Kembali oleh petugas operator di Siola, lalu nantinya akan diverifikasi lagi oleh operator dari kemendagri, setelah selesai verifikasi maka akan diolah datanya sehingga nanti bisa muncul dokumen yang diajukan oleh warga.

b. Pemilihan (sorting)

Proses pemilihan dalam pengelolaan data kependudukan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentang administrasi kependudukan. Tetapi disini masyarakat tidak perlu harus melihat Undang-Undang tersebut, karena untuk pihak Dispenduknya sendiri sudah menyediakan brosur tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pengajuan administrasi kependudukan.

Selain itu untuk kegiatan pemilihan data ini juga dijelaskan dalam Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa ada beberapa jenis data yang bisa dihapus. Data-data itu diantaranya yaitu:

- 1) Data Ganda
- 2) Data yang tidak dapat di adjudikasi
- 3) Kesalahan perekaman
- 4) Status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap
- 5) Data anomaly
- 6) Data penduduk nonaktif

Dengan adanya kegiatan sorting data berdasarkan pada beberapa hal diatas, maka data yang terdapat dalam SIAK merupakan data yang sudah benar, dan

sudah merupakan data kependudukan yang terupdate. Sehingga untuk data yang lama dan tidak sesuai dengan kondisi penduduk saat ini sudah terhapus, dan tidak ada lagi permasalahan di dalam data kependudukan tersebut.

c. Penggunaan (manipulating)

Dalam proses pengelolaan data berdasarkan pada "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah," menghasilkan beberapa data, diantaranya yaitu:

- 1) Data Agregat Kependudukan
- 2) Data Kependudukan Bersih
- 3) Profil Data Kependudukan
- 4) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

Di Dispendukcapil sendiri untuk hasil pengelolaan data kependudukan berupa profil data kependudukan bisa diakses dalam website resminya. Selai itu untuk instansi yang memanfaatkan hasil dari proses pengelolaan ini terbagi menjadi 2 jenis di dalamnya. untuk jenis pertama yaitu dari instansi pemerintah sendiri yang memanfaatkan data kependudukan ini secara gratis. Dan yang kedua adalah selain dari instansi pemerintahan yang memanfaatkan data kependudukan dengan membayar sebesar Rp. 1000 untuk biayan operasional.

Pada proses penggunaan data ini, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil disini memiliki wewenang untuk memfasilitasi pemberian izin kepada pihak ke tiga untuk dapat memanfaatkan hasil dari pengelolaan data kependudukan ini. untuk pemberian izinya disini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memberikan link berupa web Servis dan web portal. Untuk web servis sendiri disini hanya bisa digunakan untuk mengecek Benar atau salah. misalkan saat dimasukkan data penduduk seperti NIK, nama dll saat di submit maka akan ada pemberitahuan kalau data yang dimasukkan itu benar atau salah. sedangkan untuk web portal berguna untuk mengecek apakah alamat penduduk itu ada atau tidak. Biasanya disini mengecek apakah saat memasukkan NIK penduduk tersebut tercatat atau tidak.

Dalam hal proses pemanfaatan hasil pengelolaan data kependudukan ini diterangkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala itu diantaranya belum siapnya system yang dimiliki oleh pihak ketiga, sehingga mereka perlu waktu untuk menggunakan hasil dari pengelolaan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil kota Surabaya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Pengelolaan Data Kependudukan di Kota Surabaya

Faktor Pendukung Pengelolaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Dalam proses pengelolaan data kependudukan terdapat beberapa faktor pendukung agar kegiatan pengelolaan ini bisa berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor pendukung itu diantaranya yaitu:

1. Manajemen kepemimpinan

Untuk menciptakan sebuah pelayanan yang maksimal khususnya dalam hal pengelolaan data kependudukan, diperlukan adanya inovasi di dalamnya. agar inovasi ini dapat berkembang maka dukungan aktif dari pemimpin sangat menjadi

faktor utama agar hal ini bisa berjalan. Untuk pelaksanaannya di Dispenduksendiri dari pemimpin nya sangat mendukung adanya peningkatan inovasi pengelolaan data kependudukan ini. dimuai dari Wali Kota Surabaya yang sangat gentar sekali untuk meningkatkan pelayanan yang ada di kota Surabaya khusunya untuk Dispendukcapil yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan data kependudukan. Untuk wali kota Surabaya sendiri dalam memberikan dorongan untuk peningkatan kualitas pengelolaan kependudukan ini, di terbitkannya peraturan-peraturan tentang inovasi ini. selain itu wali kota juga memberi masukan-masukan bagaimana pelayanan ini bisa lebih menjangkau semua masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

Selain dukungan penuh dari Wali Kota Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga turut berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan Kota Surabaya. Sehingga peningkatan kualitas ini berjalan dengan cepat dan akurat. Serta Kadis sendiri berdasarkan keterangan dari bawahannya berkoordinasi dengan bawahannya dalam menangani masalah yang ada dalam proses pengelolaan data kependudukan.

2. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan. Karena dalam pengembangan system yang digunakan untuk pengelolaan data pastinya akan membutuhkan dana yang cukup besar. Belum juga untuk kelengkapan sarana-prasaranan demi kelancaran pengelolaan data kependudukan di semua wilayah di Kota Surabaya. Maka dari itu dukungan anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung agar proses pengelolaan data ini lancer di semua wilayah kota Surabaya.

3. Sumber Daya Manusia

Untuk sumber daya manusia ini dari pihak dispendukcapil kota Surabaya sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang mereka miliki. Hal ini bisa dilihat dari daftar jumlah karyawan dispenduk berdasrkan pada Pendidikan yang mereka miliki, untuk jumlahnya sudah tercantumkan pada hasil penelitian. Selain bisa dilihat dari tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya, kualitas Sumber daya manusia juga bisa dilihat pada penduduk Surabaya yang menggunakan pelayanan yang disediakan dinas kependudukan. Mereka sebenarnya memiliki dorongan untuk berpartisipasi aktif agar proses pengelolaan data kependudukan ini bisa berkembang semakin pesat. Tinggal dari pihak dispendukcapil melakukan sosialisasi secara meluas kepada warga. Peningkatan SDM ini juga dilakukan dispenduk kepada petugas Kecamatan, Kelurahan, dan juga RT/RW. Mereka mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan pengajuan menggunakan aplikasi KNG. Dengan begini harapannya bisa meningkatkan proses pengumpulan data untuk dilakukan proses pengelolaan. Sehingga data kependudukan di kota Surabaya lebih akurat dan lebih terupdate.

Faktor Penghambat dalam Proses Pengelolaan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Selain adanya faktor pendukung,, dalam proses pengelolaan data kependudukan pasti juga terdapat faktor penghambat. Dari hasil penjelasan

beberapa narasumber terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, faktor-faktor itu diantaranya yaitu:

1. Warga Surabaya

Selain bisa menjadi faktor pendukung, warga Surabaya juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan data kependudukan yang ada di Kota Surabaya. Ini disebabkan oleh beberapa hal yang sering terjadi. Hal itu diantaranya yaitu:

- a) Kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya untuk mengupdate data kependudukan yang ada dalam dokumen kependudukan mereka.
- b) Kemampuan warga dalam segi ekonomi dan juga dalam segi pengoperasian aplikasi pendukung dalam pengelolaan data kependudukan.
- c) Adanya warga yang abai apabila ternyata dalam dokumen kependudukan mereka terdapat informasi data yang salah.

Karena hal ini bisa menyebabkan data kependudukan yang ada di Kota Surabaya kurang akurat, karena data yang harusnya di update karena beberapa hal diatas. Tetapi tidak segera diurus oleh warga.

2. Sarana Prasarana

Untuk sarana dan prasarana khusunya di tingkat kelurahan, kecamatan dan juga RT/RW perlu adanya peningkatan. Sehingga nantinya tidak menjadi faktor penghambat lagi. Untuk di kelurahan dan rt/rw seringnya mereka mengalami kendala karena jaringan yang kurang stabil.

3. Sosialisasi

Pengetahuna mengenai pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan masih cukup kurang bagi warga Surabaya. Khususnya bagi warga yang berada pada Kondisi ekonomi menengah Kebawah. Padahal saat mereka tau, pasti mereka akan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan data kependudukan ini. selama ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melakukan sosialisasi melalui media online. Serta melalui kelurahan, kecamatan. Sedangkan sosialisasi secara langsung kepada warga sangat jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan warga masih kurang mengetahui arti penting dari dokumen administrasi kependuduka. Karena hal ini bisa membuat mereka tidak melakukan update data kependudukan mereka.

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan data kependudukan di Kota Surabaya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Hal ini selain karena dukungan dari berbagai pihak di daerah Surabaya, tetapi juga komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan proses pengelolaan data kependudukan di setiap daerah di Indonesia juga menjadi salah satu alasannya.

1. Proses Pengelolaan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Dalam proses pengelolaan data kependudukan jika dilihat dari beberapa indikator yang dijelaskan pada teori pengelolaan data oleh tata Sutabri dari 6 sub indikator ada yang sudah bisa dikatakan baik. Tetapi ada juga bisa dikatakan cukup. Seperti pada sub indikator pertama yaitu indikator pengumpulan. Di

Dispenduk sudah cukup baik dengan membuat aplikasi tambahan KNG dalam proses pengelolaan data kependudukan, tetapi kurangnya koordinasi antara pihak Dispendukcapil kota Surabaya, petugas kelurahan, kecamatan RT/RW dan warga Surabaya menyebabkan proses pengumpulan data ini menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu untuk indikator kedua Pencarian sudah baik, karena dalam proses pencarian ini dalam system SIAK ini terdapat beberapa pengelompokan data, selain itu dalam proses pencarian data juga bisa menggunakan beberapa kode, seperti kode wilayah daerah, NIK, maupun No. KK bisa digunakan sebagai cara untuk melakukan pencarian data. Lalu untuk sb indikator ke 3 masalah pemeliharaan, dalam proses pengelolaan data kependudukan juga sudah baik dalam pelaksanaannya karena disini untuk update data kependudukan bisa dilakukan sewaktu-waktu saat masyarakat melakukan permohonan. Selain itu untuk system SIAK nya sendiri dari pusat satu tahun bisa 3-4 kali mengalami update. Untuk aplikasi KNG nya sendiri minimal satu semester sekali. Tapi bisa juga di update sewaktu-waktu kalau ada peningkatan system KNG.

Untuk sub indikator selanjutnya yaitu Pemeriksaan, di Dispendukcapilsudah baik dalam hal pemeriksaan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaan data kependudukan dilakukan beberapa kali proses pemeriksa, diantaranya yaitu saat akan melakukan permohonan menggunakan aplikasi KNG. Setelah itu pengecekan juga dilakukan saat akan memasukkan data penduduk dalam SIAK. untuk sub indikator selanjutnya ialah pemilihan. Pada proses pemilihan ini sudah cukup baik. Karen sudah disesuaikan dengan undang-undang. Tapi sama dengan sub indikator pengumpulan data. Sub indikator ini tidak akan bisa berjalan dengan masksimal apabila masih kurang adanya koordinasi antara pemerintah dan warga Surabaya. Untuk sub indikator terakhir ialah penggunaan. Pada indikator ini juga sudah terbilang cukup baik. Tapi sub indikaotor ini bisa lebih baik lagi apabila koordinasi dengan pihak ke tiga yang memanfaatkan data kependudukan bisa lebih baik lagi. Sehingga pihak ke tig aini tidak akan menjadi penghambat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pengelolaan Data Kependudukan Di Dinas Kependudukan Kota Surabaya

Untuk faktor pendukung dari proses pengelolaan data kependudukan diantaranya yaitu

- a) Adanya dukungan penuh dari pemimpin, baik itu wali kota maupun kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- b) Anggaran yang sudah disediakan untuk pengembangan dalam hal pengelolaan data kependudukan di kota Surabaya
- c) SDM yang mumpuni untuk melakukan proses pengelolaan data kependudukan

Sedangkan untuk faktor penghambat sendiri terdapat beberapa hal diantaranya yaitu:

- a) Kurang nya koordinasi antara pemerintah dan juga warga dalam hal administrasi kependudukan. Sehingga menyebabkan warga abai terhadapa kepengurusan administrasi kependudukan.
- b) Kurangnya kemampuan warga dari segi ekonomi dan juga kemampuan dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan

- c) Masih sedikit terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan data kependudukan
- d) Kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah kepeda masyarakat juga menjadi salah satu penghambat dalam proses pengelolaan data ini.

Dari kesimpulan yang dilakukan penulis maka terdapat beberapa saran yang bisa diberikan penulis dalam hal pengelolaan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Saran itu diantaranya yaitu:

- 1. Dalam hal pengumpulan data kependudukan, alangkah baikknya jika pemerintah khususnya disini Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan warga secara langsung, tidak hanya melalui media sosial saja. Karena dengan ini akan meningkatkan kesadaran warga Surabaya bahwa untuk memperbarui data kependudukan itu sangat penting. Sehingga dengan begini nantinya data kependudukan khusunya kota Surabaya lebih akurat lagi.
- 2. Meningkatkan sarana-dan prasarana sehingga saat melakukan proses pengelolaan data tidak ada hambatan.
- 3. Memanfaatkan para pemuda untuk melancarkan kegiatan pengelolaan data kependudukan di kota Surabaya. Tetapi disini sebelum meminta bantuan mereka, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melakukan pembekalan terhadap para pemuda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. (n.d.). *TUGAS DISPENDUKCAPIL*. DISPENDUKCAPIL. Retrieved December 30, 2022, from https://dispendukcapil.situbondokab.go.id/tugas#:~:text=Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada,daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dispendukcapil kota surabaya. (n.d.). *Profil Dispendukcapil Kota Surabaya*.
- https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/informasiumum/
 Harto, Ambosius; Pandia, A. S. (2021). *Perubahan Data Kependudukan di Surabaya Bisa Dilakukan di Kecamatan dan Kelurahan*. Kompas.Com.

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/17/perubahan-data-kependudukan-di-surabaya-bisa-dilakukan-di-kecamatan-dan-kelurahan/

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. (2019). *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 65(1114), 2019.
- Perpres No.95 Tahun 2018. (2018). Perpres No.95 Tahun 2018. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 110.
- Perwali Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. (2021). 1965, 1–7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Sutabri, T. (2012). Konsep Sistem Informasi (I. Nastiti (Ed.); 1st ed.). CV ANDI OFFSET.

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,

Vol. 3 No. 1 (2023) e-ISSN: 2797-04692

 $https://books.google.co.id/books?id=uI5eDwAAQBAJ\&printsec=frontover\&hl=id\&source=gbs_ge_summary_r\&cad=0\#v=onepage\&q\&f=true\\$